



SDA Loloskan Pemandokan Tak Layak

Istana Nikmati Sisa Kouta Haji

JAKARTA - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) boleh berkilah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyelenggaraan haji 2010-2012. Namun faktanya sejumlah saksi dalam sidang memberi keterangan yang menyudutkan politisi PPP tersebut.

Salah satu yang memberikan keterangan menyudutkan posisi SDA ialah Zaenal Abidin Supi, mantan ketua tim perumahan sekaligus direktur Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag). Zaenal mengaku mendapat perintah dari SDA untuk meloloskan pemandokan bagi jamaah haji. Padahal pemandokan itu sebelumnya sudah disurvei dan dinyatakan tidak layak.

Pernyataan Zaenal itu disampaikan saat ditanya jaksa KPK Abdul Basir dalam sidang di pengadilan tipikor, kemarin (4/11). Saat itu jaksa bertanya seputar penunjukan pemandokan di Syare' Mansyur 1 dan 2 yang belakangan diketahui milik Cholid Abdul Latief (pemberi kain kiswah atau penutup kabah). "Coba jelaskan soal penunjukan pemandokan di Syare' Man-

syur?" tanya jaksa.

Zaenal membeberkan, saat itu ada penawaran empat rumah di Syare' Mansyur dari seorang perantara. "Saya lupa nama perantara itu. Saat itu penawaran kami tolak karena beberapa hal," jawabnya. Setelah penawaran pemandokan itu ditolak, SDA lantas menelepon Zaenal. Dia bertanya mengapa penawaran pemandokan yang diajukan Muklisin (politikus PPP) terse-



Saya jelaskan alasan penolakannya, karena jauh (dari Masjidilharam) dan rawan kriminalitas"

Zaenal

but ditolak. "Saya jelaskan alasan penolakannya, karena jauh (dari Masjidilharam) dan rawan kriminalitas," jelas Zaenal.

Dengan segala dalihnya, SDA menjelaskan bahwa pemilik pemandokan siap memenuhi fasilitas yang dianggap kurang baik. "Saat Pak SDA menyatakan demikian, saya jawab baik pak," ujar Zaenal. Telepon dari SDA tersebut

langsung ditindaklanjuti tim 9 yang bertugas mengurus pemandokan.

Dalam pelaksanaannya, pemilik pemandokan itu ternyata tidak memenuhi kewajibannya seperti yang disampaikan SDA. Seperti misalnya penyediaan bus dan pos pengamanan. Dua item itu hanya seminggu disediakan.

Hakim Casmaya juga mencecar sejumlah pertanyaan pada Zaenal. Salah satunya terkait penggunaan sisa kuota nasional haji. "Kok bisa DPR itu dapat jatah sisa kuota?" tanya Casmaya. Ditanya seperti itu Zaenal tak bisa menjawab. "Saya tidak hafal satu persatu namanya (yang menggunakan sisa kuota). Itu di luar pantauan saya, Yang Mulia," ujarnya.

Saat diberi kesempatan bertanya pada Zaenal, SDA mengatakan bahwa sisa kuota bukan hanya diberikan pada DPR. Namun juga dimanfaatkan sejumlah pihak. "Bukan pada DPR saja itu, pada BPK, BPKP, Menhan, staf khusus presiden (era SBY), mantan Menkumham," ucapnya. SDA juga membantah keterangan Zaenal terkait perintah memasukan pemandokan di Syare' Mansyur. "Saya ini yang membuat aturan soal pemandokan, tidak mungkin saya langgar sendiri," ungkapnya. (gun/agn)